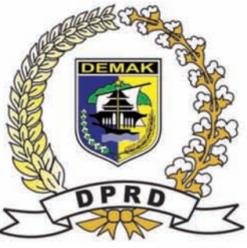


## Kajian Raperda Kabupaten Demak tentang Kepala Desa Soal Pembiayaan Pilkades Alot Diperdebatkan



VARIA LEGISLATIF

**DEMAK (KR)** - Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa intensif dilakukan Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Kabupaten Demak. Sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 183 desa, yang dijadwalkan pada November 2022.

Ketua Pansus A DPRD Kabupaten Demak H Marwan menjelaskan, sesuai peraturan perundangan persiapan Pilkades harus sudah dilakukan panitia enam bulan menjelang pelaksanaan. "Jika Pilkades serentak

diagendakan November 2022, maka enam bulan sebelumnya adalah April. Sehingga Raperda tentang Kepala Desa wajib hukumnya selesai dibahas dan ditetapkan sebelum April ini," ujarnya, Rabu (16/3).

Sejumlah persoalan mengemuka pada kajian raperda oleh Panitia Khusus Pansus A DPRD Kabupaten Demak bersama narasumber dari Kemenkumham, akademisi serta pejabat terkait di Dinpermasdes P2KB dan Bagian Hukum Setda Demak. Namun satu di antara yang paling alot diperdebatkan, yakni terkait pembiayaan.

Menurut Marwan, pembiayaan pilkades selain dari APBD dapat pula didukung APBDes masa pandemi. Hal itu sebagaimana Permendagri Nomor 72 tahun 2020.

"Namun persoalan muncul karena saat ini kondisi covid-19 menuju endemi. Sehingga jika November 2020 status negeri ini sudah endemi, maka Permendagri 72 sebagai pedoman penganggaran pilkades bersumber APBDes masa pandemi bisa tidak berlaku," ujar wakil rakyat dari Partai Gerindra itu.



Kajian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa oleh Pansus A DPRD Kabupaten Demak, yang menghadirkan narasumber dari akademisi, Kemenkumham dan OPD terkait.

Sementara APBD Kabupaten Demak 2022 hanya mengalokasikan anggaran pilkades senilai Rp 1,4 miliar. Sehingga ketika dibagikan ke 183 desa penyelenggara pilkades, maka

setiap desa hanya mendapatkan bantuan anggaran antara Rp 6,5 juta hingga Rp 16 juta berdasarkan besar-kecilnya pendapatan asli desa masing-masing.

Sedangkan berdasarkan pengalaman, penyelenggaraan pilkades rata-rata diestimasi membutuhkan biaya puluhan juta rupiah hingga tak kurang dari Rp 100 juta. Pada saat

sama, mencari dana dari sumber lain seperti minta sumbangan dana dari calon tidak diperkenankan peraturan perundangan.

"Menurut kami hukum mestinya tidak seperti kacamata kuda. Karenanya Pansus A berusaha supaya pembiayaan tak hanya berasal dari APBD, namun bisa pula dari APBDes tanpa embel-embel pandemi atau endemi, serta sumber lain yang diperkenankan peraturan perundangan. Sementara kaitannya prokes, bisa diambil dari 8% Dana Desa (DD)," imbuh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak itu.

Di sisi lain, Pansus A juga akan mendorong Bupati Demak membuat perbup tentang standar harga barang dan jasa khusus untuk pilkades. Tujuannya tentu agar nantinya panitia tidak 'umpak-umpakan' atau seenaknya dalam mengelola dana pilkades.

"Semua ini upaya kami menjalankan fungsi legislatif. Yakni menyusun perda yang 'on the track' agar dapat berlaku jangka panjang," tandas Marwan. \*ssj

## Anggaran Pemilu 2024 Disepakati Rp 86 Triliun

**JAKARTA (KR)** - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan, anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu sebesar Rp 86 triliun. Oleh karena itu, ia menilai anggaran Pemilu 2024 tidak perlu menjadi polemik terutama sampai mengarah kepada isu penundaan pemilu.

"Siapa yang bilang terjadi polemik terkait anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati di Komisi II DPR sebesar Rp 86 triliun," kata Junimart di Jakarta, Rabu (16/3).

Komisi II DPR, ujarnya, menunggu tindak lanjut pembahasan anggaran Pemilu 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pihaknya, sudah mengadakan pertemuan informal dengan Pimpinan Banggar DPR terkait anggaran Pemilu 2024. Namun, Junimart enggan menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut.

"Komisi II DPR telah menindaklanjuti dalam pertemuan informal, saya sudah komunikasikan kepada Pimpinan Banggar DPR," tegasnya.

Selain itu, menurut Junimart, Komisi II DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU-Bawaslu untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 pada 11 April 2022.

Dengan telah disepakati anggaran Pemilu 2024, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, jadwal pemilu sudah dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Kesepakatan bersama ini juga sudah disetujui pemerintah, DPR

dan penyelenggara pemilu.

"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati, pemilu pada 14 Februari 2024," kata Puan saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat.

Menurut Puan, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Wacana penundaan pemilu yang digelindingkan segelintir ketua umum partai pada akhirnya menuai kontroversi. Sebab, beberapa tokoh partai dan politisi di parlemen banyak yang tidak sependapat. Lebih-lebih ketika tanggal penyelenggaraan sudah disepakati berikut anggaran untuk pembiayaan pesta demokrasi lima tahunan itu, juga sudah mendapat persetujuan, sehingga Pemilu 2024 jalan terus. (Sim/Ant)-d

## PEMANFAATAN RUAS JALAN TAK BERIZIN Ratusan Miliar Rupiah Pertahun Hilang

**YOGYA (KR)** - Panitia Khusus (Pansus) BA 4/2020 DPRD DIY yang melakukan pengawasan terhadap Perda DIY Nomor 6/2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi menemukan adanya kehilangan ratusan miliar rupiah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemda DIY dinilai abai terhadap hal ini. Pasalnya lima tahun pasca Perda diterbitkan, belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus Ispriyatun Katir Triatmojo kepada wartawan usai rapat kerja, Rabu (16/3). Dari 97 ruas jalan provinsi dengan panjang 760 kilometer baru 15 persennya saja yang sudah dimanfaatkan. Itupun didominasi pelanggaran karena pemanfaatannya secara ilegal.

"Padahal jelas-jelas dalam Perda telah mengamatkan untuk segera diterbitkan Pergub tentang sewa pemanfaatan badan jalan provinsi. Belum adanya Pergub ini, lantas dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Padahal biaya sewanya dapat dimaksimalkan untuk PAD," jelasnya. (Awh/Bro)-d

Hal ini membuat Pemda terkesan abai untuk melaksanakan Perda. Padahal potensi pemanfaatan bagian jalan provinsi itu sangat besar. Baik yang di permukaan jalan seperti reklame, tiang provider maupun di bawah permukaan. Misalnya saluran limbah, fiber optic dan lainnya.

"Ini terkesan Pemda abai. Padahal potensi untuk memaksimalkan PAD sangat besar. Ratusan miliar per tahun. Tanpa adanya Pergub inilah yang lantas dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap anggota Pansus RM Sinarbiatnujatan.

Sementara itu berdasarkan data yang didapat Pansus, sepanjang 2018-2021 baru ada 200 izin penggunaan dan pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi yang masuk. Padahal secara existing ada ribuan proyek di atas 97 ruas jalan provinsi.

"Ini menjadi catatan keras Pansus. Apalagi aset tersebut sudah sah milik Pemda DIY. Namun justru ada kesan pembiaran. Pemda membuat aturan tapi dilanggar sendiri. Kami akan terus mengawal sampai ada jalan keluar atas masalah ini," tegas anggota pansus Arif Setiadi.

## SETELAH JADI TERSANGKA TPPU

### KPK Sita Aset BS Senilai Rp 10 M

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset senilai Rp 10 miliar yang diduga milik tersangka Budhi Sarwono (BS). Penyitaan itu dilakukan KPK setelah Bupati Banjarnegara nonaktif itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Perlu kami sampaikan, sejauh ini kami telah melakukan penyitaan aset-aset yang diduga milik tersangka ini kurang lebih Rp 10 miliar," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/3).

Disebutkan, hingga saat ini tim penyidik masih mengusut dugaan pencucian uang tersebut dan setiap perkembangannya diinformasikan kembali. Jadi, ujar Ali, dalam hal ini tentu prosesnya masih panjang. "Namun, nanti perkembangannya akan

kami sampaikan," kata Ali seraya menambahkan, KPK telah memeriksa 11 saksi di Mako Brimob Purwokerto dalam penyidikan kasus dugaan TPPU Budhi Sarwono tersebut.

Pada Senin (14/3), menurutnya, KPK memeriksa lima saksi. Para saksi itu adalah Afton Saefudin dari pihak swasta serta empat notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) masing-masing Sri Endang Suprihkhani, Aglis Widodo, Adi Akbar dan Sonny Dewangkoro.

Selanjutnya Selasa (15/3), KPK memeriksa enam saksi lainnya, yakni Heni Arief Prianto dari pihak swasta serta lima notaris dan PPAT masing-masing Jigatra Digdaya Haq, Sopan, Doddy Saiful Islam, Setya Lindu Jayati dan Dewi Rubijanto.

"Para saksi dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset tersangka BS yang berada

di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya," jelas Ali Fikri.

Dalam kasus TPPU, Budhi diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamaran asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Hal itu diantaranya dilakukan dengan membelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak.

Sementara yang terkait penetapan TPPU tersebut, merupakan pengembangan dari kasus korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Dalam kasus korupsi dan penerimaan gratifikasi, KPK telah menetapkan Budhi dan Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi sebagai tersangka. (Ful)-f

## SINDIKAT PENIPUAN INTERNASIONAL 26 WNA China Dipulangkan

**JAKARTA (KR)** - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memulangkan 26 Warga Negara Asing (WNA) asal China ke negara asalnya. Pasalnya, WNA tersebut terkait dugaan keterlibatan sebagai sindikat penipuan internasional.

"Untuk itu, tim dari Direktorat Wasdakim (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) saat ini sedang melakukan persiapan untuk pendeportasian 26 WNA, karena diduga sebagai sindikat penipuan internasional tersebut," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pria Wibawa dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (16/3).

Disebutkan, kasus itu bermula saat 26 WNA asal China diserahterimakan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kepada Ditjen Imigrasi, Selasa (15/3). Hal ini karena mereka diduga kelompok sindikat penipuan internasional pelaku cyber fraud (penipuan siber) melalui medium pesan aplikasi WhatsApp dan call center palsu.

Mengenai penangkapan terduga sindikat penipuan internasional tersebut berawal dari informasi daftar pencarian orang oleh Kepolisian Taiwan, yang diterima Bareskrim Polri. (Ful)-f

## IKUTI RANGKAIAN PRESIDENSI G20 27 Delegasi Gunakan Sistem Bubble

**YOGYA (KR)** - DIY mendapatkan kehormatan sebagai salah satu daerah yang menjadi tuan rumah G20, selain Bali dan DKI Jakarta. Kedatangan delegasi sudah diatur oleh panitia pusat, dengan Prokes yang sangat ketat. Semua peserta diwajibkan mengikuti sistem bubble dan rutin melakukan tes antigen sebelum mengikuti forum. Sebanyak 27 delegasi dari negara anggota G20 dipastikan mengikuti pembukaan Presidensi G20 di DIY.

"Seperti direncanakan, sejak awal sedikitnya ada 10 agenda pertemuan tingkat tinggi yang bakal digelar sepanjang Maret hingga September 2022 mendatang. Berdasarkan informasi yang saya dapat ada 27 delegasi dari negara anggota G20 yang akan mengikuti pembukaan Presidensi G20 di DIY. Agenda awal G20 di DIY adalah pertemuan tingkat tinggi bertajuk 1st Education Working Group Meeting yang digelar Hotel Royal Ambarukmo dari 16-18 Maret," kata Sekda DIY, K Baskara Aji di Kepatihan, Rabu (16/3).

Baskara Aji mengatakan, kegiatan presidensi KTT G20 diadakan dalam situasi pandemi untuk itu. Panitia selalu berupaya memastikan agar Prokes bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu caranya dengan menggunakan sistem bubble, sehingga kondisi kesehatan peserta bisa dipantau dengan mudah. (Ria)-d



KR-Antara/Yusuf Nugroho

**BANJIR DI GROBOGAN:** Warga berdiri di dalam rumah yang tergenang air di Desa Cingrong, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (16/3). Akibat intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya Sungai Serang menyebabkan ratusan rumah, beberapa sekolah serta jalan utama di desa itu terendam banjir.